

# Strategi Kampanye Inklusif : Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Symbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Ariella A. Yoteni<sup>1</sup>, Ayudya Rizqi<sup>2</sup>, Halice N. Tasty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

<sup>1</sup> [ariella.yoteni@gmail.com](mailto:ariella.yoteni@gmail.com), <sup>2</sup> [halicenandini16@gmail.com](mailto:halicenandini16@gmail.com), <sup>3</sup> [drayudya@gmail.com](mailto:drayudya@gmail.com)

## ABSTRAK

Kesenjangan gender dalam partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan isu penting dalam demokrasi yang inklusif. Meskipun memiliki hak yang sama, keterlibatan perempuan terhambat oleh bahasa dan simbol-simbol yang tidak responsif gender dalam kampanye. Namun, peraturan hukum, seperti UU Pemilu, memberikan dukungan untuk lingkungan yang inklusif. Pada Pemilu Legislatif 2019, terdapat fokus pada penggunaan strategi kampanye inklusif yang menggabungkan bahasa dan simbol yang responsif gender. UU Pemilu mengamanatkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Dengan menggunakan bahasa yang netral gender, kampanye dapat menumbuhkan suasana yang mendorong keterlibatan politik perempuan. Selain itu, peraturan seperti PKPU tentang Kampanye Pemilu mendorong penggunaan bahasa dan simbol yang responsif gender untuk mencegah diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kurangnya partisipasi politik perempuan di Indonesia dan kurangnya inklusi dalam kampanye politik, menganalisis tantangan yang terkait dengan gender dalam kampanye politik, mengembangkan strategi kampanye inklusif yang berfokus pada penggunaan bahasa dan simbol gender yang responsif, dan mengukur bagaimana strategi-strategi ini berdampak pada partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu online research dan studi literatur. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap masalah gender dalam politik, memberikan pedoman praktis untuk kampanye politik inklusif, dan memberikan bukti empiris yang berguna untuk perdebatan kebijakan.

### Kata kunci:

Strategi Kampanye  
Inklusif  
Bahasa dan Simbol  
dalam Kampanye  
Perempuan dalam  
Politik

### Keywords:

Inklusif Campaign  
Strategic  
Languages and Symbol  
in Campaign  
Women in Political

The gender gap in women's political participation in Indonesia is an important issue in an inclusive democracy. Despite having equal rights, women's engagement is hindered by non-gender-responsive language and symbols in campaigns. However, legal regulations, such as the Election Law, provide support for an inclusive environment. In the 2019 legislative elections, there was a focus on using inclusive campaign strategies that incorporated gender-responsive language and symbols. The Election Law mandates a minimum of 30% female representation on the list of legislative candidates. By using gender-neutral language, campaigns can foster an atmosphere that encourages women's political engagement. In addition, regulations such as PKPU on Election Campaigns encourage the use of gender-responsive language and symbols to prevent discrimination. The purpose of this research is to find, analyze, and resolve issues related to women's lack of political participation in Indonesia and lack of inclusion in political campaigns, analyze gender-related challenges in political campaigns, develop inclusive campaign strategies that focus on the use of gender-responsive language and symbols, and measure how these strategies impact women's political participation. This research uses two main methods, namely online research and literature study. The results of this research are expected to raise awareness of gender issues in politics, provide practical guidelines for inclusive political campaigns, and provide useful empirical evidence for policy debates.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan isu yang penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan representatif. Meskipun perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik, namun angka partisipasi politik perempuan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan bahasa dan simbol-simbol dalam kampanye politik yang tidak responsif gender. Penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang tidak responsif gender dalam kampanye politik dapat menghambat partisipasi aktif perempuan. Bahasa dan simbol-simbol tersebut seringkali mencerminkan stereotipe gender atau memosisikan perempuan hanya sebagai pendamping atau bagian dari keluarga, bukan sebagai individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi politik yang sama dengan laki-laki.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan hukum yang mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan politik inklusif bagi partisipasi politik perempuan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam UU Pemilu tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai kesetaraan gender dalam proses pemilihan umum (MKRI, 2023). Sebagai contoh kasus tentang pentingnya strategi kampanye inklusif dengan mengoptimalkan penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender untuk mendukung partisipasi politik perempuan di Indonesia adalah pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 (Kemenpppa, 2018).

Dalam buku *Komunikasi Politik*, Yusuf berpendapat bahwa komunikasi politik memiliki peran penting dalam sistem politik untuk menghubungkan informasi politik antara berbagai bagian sistem politik dan masyarakat. Komunikasi politik juga mempengaruhi sudut pandang, asal usul, dan ajakan pihak yang memiliki kekuasaan serta melibatkan berbagai pandangan masyarakat. Komunikasi politik juga merupakan penentu dari elemen dinamis dalam sistem politik, sosialisasi politik, kontribusi politik, dan tahap perekrutan dalam ruang lingkup politik (Yusuf, 2022). Dalam strategi komunikasi politik, media menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, media tidak selalu mendeskripsikan informasi gender secara negatif sehingga dapat mendukung partisipasi perempuan dalam konteks politik di Indonesia. Media dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kedudukan dan kontribusi perempuan untuk mendukung partisipasinya di bidang politik.

Teori difusi inovasi menjelaskan tentang cara ide atau teknologi disebarkan dalam suatu budaya melalui saluran komunikasi tertentu selama jangka waktu yang panjang. Teori ini mencakup empat aspek yaitu inovasi itu sendiri, komunikasi, waktu, dan sistem sosial (Renny Puspitasari, 2017). Dengan memahami teori difusi inovasi ini seperti yang dipaparkan oleh Everest M. Rogers, Adawiyah dapat mengoptimalkan penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender dalam menyampaikan informasi politik melalui media (Adawiyah, 2018). Teori gender menilai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial berdasarkan faktor biologis (Rokhmansyah Alfian, 2016). Teori ini menciptakan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Gender berkaitan dengan hubungan sosial, sifat, kedudukan, dan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat (Fanani, 2017). Perbedaan ini memiliki konsekuensi yang signifikan dan dapat menciptakan perubahan.

Teori feminisme politik adalah kumpulan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang bertujuan untuk memperjuangkan pembebasan wanita dari ketidakseimbangan gender dengan memeriksa peranan dan pengalaman unik yang dialami oleh wanita (Wardana, 2022). Feminisme bukan hanya tentang pengetahuan tetapi juga tindakan. Teori feminisme menciptakan kesadaran tentang kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan serta rasa solidaritas terhadap isu-isu gender di seluruh dunia (Damayanti, 2021). Teori partisipasi politik menjelaskan aktivitas individu atau kelompok dalam memberikan pengaruh pada pembentukan kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti ikut serta dalam pemilihan umum atau rapat-rapat politik (Sastrawati, 2019). Partisipasi politik melibatkan seluruh masyarakat dalam memberikan pengaruh pada pemilihan pejabat dan keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (Fadli et al., 2018).

Menurut Kotler dan Robert, Kampanye politik merupakan upaya persuasif yang dilakukan oleh kelompok untuk mempengaruhi sikap atau perilaku masyarakat terkait dengan ideologi atau kandidat tertentu (Prayitno, 2017). Kampanye politik bertujuan untuk memodifikasi atau menghapuskan ide, sikap, atau perilaku tertentu. Menurut Sayuti, Kualitas perubahan yang diusulkan oleh kampanye politik bergantung pada pertimbangan rasional yang digunakan oleh masyarakat sebagai dasar pemilihan mereka (Rahmayanti, 2020). Secara keseluruhan, implementasi strategi komunikasi politik yang efektif membutuhkan pemahaman tentang teori-teori seperti difusi inovasi, gender, feminisme politik, partisipasi politik, dan kampanye politik. Dengan menggunakan teori-teori ini dengan baik dan tepat sasaran dapat menciptakan kampanye inklusif dan mendukung partisipasi perempuan dalam konteks politik di Indonesia.

Dalam kampanye Pileg tersebut, terdapat beberapa contoh penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang tidak responsif gender. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah "calon anggota legislatif" yang secara

default merujuk pada laki-laki. Penggunaan istilah tersebut dapat mengabaikan keberadaan calon perempuan dan memosisikan mereka sebagai pengecualian atau tambahan dari norma yang sudah ada. Dengan adanya UU Pemilu yang mendukung kesetaraan gender, partai politik diwajibkan untuk mencantumkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. (Kurniawan, 2014) Hal ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik melalui pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Strategi kampanye inklusif juga dapat diterapkan dengan menggunakan bahasa responsif gender. Misalnya, dalam kampanye Pileg tersebut dapat digunakan istilah "calon anggota legislatif" tanpa spesifik merujuk pada jenis kelamin tertentu sehingga menciptakan lingkungan politik yang inklusif bagi partisipasi politik perempuan. Selain UU Pemilu, terdapat juga beberapa regulasi lainnya di Indonesia yang mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan politik inklusif bagi partisipasi politik perempuan. Salah satunya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kampanye Pemilu yang mengatur mengenai penggunaan bahasa dan simbol-simbol dalam kampanye politik (Agusta, 2020).

Dalam PKPU tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang mendorong penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender dalam kampanye politik. Misalnya, kampanye politik diwajibkan untuk tidak menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang diskriminatif atau merendahkan martabat perempuan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan menghormati hak-hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Mengingat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi pada tahun 2024, pembahasan tentang strategi kampanye inklusif dengan mengoptimalkan penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender sangatlah penting. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi aktif perempuan sebagai pemilih maupun calon merupakan hal yang krusial untuk mencapai demokrasi yang lebih representatif dan berkeadilan gender.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam proses politik, para calon pemimpin dapat lebih memperhatikan cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat melalui kampanye politik. Penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender dapat menciptakan lingkungan politik yang inklusif, di mana perempuan merasa didengar, dihargai, dan termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Pembahasan topik ini juga penting untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran dan kapasitas perempuan dalam politik. Dengan memperkuat partisipasi politik perempuan melalui strategi kampanye inklusif, stereotipe gender yang membatasi potensi perempuan dapat dikurangi. Hal ini akan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih membutuhkan upaya untuk meningkatkan angka partisipasinya (MPR RI, 2023). Penggunaan bahasa dan simbol-simbol responsif gender dalam kampanye politik merupakan salah satu strategi penting untuk mendukung partisipasi aktif perempuan. Dengan adanya regulasi-regulasi yang mendukung kesetaraan gender, diharapkan strategi kampanye inklusif dapat lebih diterapkan dalam proses politik di Indonesia menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024. Partisipasi politik perempuan yang lebih aktif akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender di negara ini.

Ada beberapa hambatan yang harus diatasi dalam partisipasi politik perempuan di Indonesia. Kampanye politik sering mengabaikan masalah gender. Kampanye politik sering kali mengabaikan penggunaan bahasa yang responsif terhadap gender dan simbol-simbol inklusif, yang dapat menghambat keterlibatan dan minat perempuan dalam politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kurangnya partisipasi politik perempuan di Indonesia dan kurangnya inklusi dalam kampanye politik. Penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang terkait dengan gender dalam kampanye politik. Penelitian ini akan menciptakan strategi kampanye inklusif yang berfokus pada penggunaan bahasa dan simbol gender yang responsif dan mengukur bagaimana strategi-strategi ini berdampak pada partisipasi politik perempuan. Penelitian ini akan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu gender dalam politik dan menggarisbawahi pentingnya kampanye yang responsif gender. Dengan mengembangkan strategi kampanye inklusif, penelitian ini akan memberikan model atau panduan praktis bagi partai politik yang berusaha meningkatkan partisipasi perempuan mereka dalam politik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu online research dan studi literatur. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi kampanye inklusif, penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender, serta partisipasi politik perempuan di Indonesia. Online research dilakukan dengan pencarian sumber secara online mencari terkait dengan isu politik

perempuan di Indonesia, strategi kampanye inklusif, dan kesetaraan gender dalam politik. Metode studi literatur dilakukan dengan pencarian sumber data lewat repositori online, basis data online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesenjangan Gender Dalam Partisipasi Politik Indonesia**

Kesenjangan gender dalam partisipasi politik di Indonesia masih menjadi isu yang relevan. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, perempuan masih menghadapi hambatan-hambatan struktural dan sosial yang membatasi akses mereka ke arena politik. Salah satu hambatan utama adalah stereotip gender yang masih kuat di masyarakat. Perempuan sering kali dianggap kurang kompeten atau tidak cocok untuk berperan aktif dalam politik. Norma budaya patriarki juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang peran dan posisi perempuan dalam kehidupan politik. Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan juga menjadi faktor penting yang membatasi partisipasi politik perempuan.

Dampak dari kesenjangan gender ini sangat signifikan terhadap demokrasi dan pembangunan negara. Ketika hanya sebagian kecil populasi yang memiliki akses penuh ke arena politik, maka suara dan aspirasi banyak orang akan terabaikan. Hal ini dapat mengurangi representativitas sistem politik dan membuat keputusan-keputusan publik tidak mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu, kesenjangan gender juga dapat menghambat pembangunan negara secara keseluruhan. Partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membawa perspektif-perspektif baru dan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah sosial-politik yang kompleks. Dengan melibatkan semua warga negara tanpa pandang jenis kelamin, negara dapat memanfaatkan potensi penuh dari seluruh sumber daya manusia yang ada.

Untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik, diperlukan upaya yang komprehensif. Pemerintah perlu mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung inklusi gender dalam politik, seperti kuota perempuan dalam struktur kelembagaan dan partai politik. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengubah stereotip dan norma budaya patriarki yang ada. Seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif. Partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa harus berperan aktif dalam mempromosikan partisipasi politik perempuan serta menggunakan bahasa dan simbol-simbol responsif gender.

Dengan mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik, Indonesia dapat mencapai kesetaraan gender sekaligus memperkuat demokrasi dan pembangunan negara. Partisipasi aktif semua warga negara tanpa pandang jenis kelamin adalah kunci untuk menciptakan sistem politik yang representatif, adil, dan berkelanjutan. Strategi kampanye inklusif memiliki peran penting dalam mencapai kesetaraan gender dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam konteks politik, strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang inklusif bagi semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka.

### **Strategi Kampanye Inklusif**

Pentingnya strategi kampanye inklusif terletak pada fakta bahwa setiap individu, tanpa pandang jenis kelamin atau identitas gender, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan menerapkan strategi ini, kita dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dan memberikan ruang yang setara bagi partisipasi politik semua individu. Ini akan meningkatkan representativitas sistem politik dan memastikan bahwa kepentingan seluruh masyarakat terwakili dengan baik. Salah satu manfaat utama dari strategi kampanye inklusif adalah menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan ramah bagi semua individu. Dalam lingkungan seperti ini, orang merasa didengar, dihargai, dan diakui tanpa takut diskriminasi atau pelecehan. Hal ini akan memperkuat partisipasi politik yang sehat dan berkelanjutan serta mendorong kolaborasi antara berbagai kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

Selain itu, strategi kampanye inklusif juga membantu mengubah norma budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Dengan menyajikan contoh-contoh positif tentang perempuan dalam posisi kepemimpinan dan memberikan ruang untuk suara-suara mereka didengar, stereotip gender dapat dikoreksi secara bertahap. Ini akan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik serta mendukung pembentukan kebijakan yang lebih adil dan responsif gender. Manfaat lainnya dari strategi kampanye inklusif adalah meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok

minoritas lainnya. Dengan mengakomodasi berbagai perspektif dan pengalaman, strategi ini akan memastikan bahwa kepentingan seluruh masyarakat terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini akan meningkatkan legitimasi sistem politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memperkuat demokrasi, penting bagi para pemimpin politik dan kampanye untuk mengadopsi strategi kampanye inklusif. Dengan melibatkan semua warga negara tanpa pandang jenis kelamin atau identitas gender mereka, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih adil, representatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Penggunaan bahasa yang responsif gender dalam komunikasi politik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperkuat kesetaraan gender. Bahasa adalah alat utama untuk menyampaikan pesan dan ide, dan penggunaannya dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik.

### **Penggunaan Bahasa Responsif Gender**

Pentingnya penggunaan bahasa yang responsif gender terletak pada fakta bahwa bahasa dapat memperkuat stereotip dan norma budaya patriarki. Misalnya, penggunaan kata-kata maskulin sebagai bentuk umum dapat mengabaikan keberagaman identitas gender serta mengesampingkan perempuan dari narasi politik. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, bagaimana bahasa dapat memperkuat stereotip adalah ketika hanya menggunakan kata "pemimpin" untuk merujuk pada laki-laki, sementara kata "istri pemimpin" digunakan untuk merujuk pada pasangan perempuan pemimpin.

Ini menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan secara tidak langsung dikaitkan dengan laki-laki, sementara perempuan dianggap hanya sebagai pendamping atau pelengkap belaka. Untuk menghindari hal tersebut, penting bagi kita untuk menggunakan bahasa yang lebih inklusif. Contohnya adalah dengan menggunakan istilah netral seperti "pemimpin" tanpa penekanan jenis kelamin atau identitas gender tertentu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan istilah kolektif seperti "warga negara" atau "masyarakat" untuk menghindari asumsi gender dalam komunikasi politik. Penggunaan bahasa responsif gender juga memiliki dampak positif terhadap partisipasi politik perempuan. Dengan menggunakan bahasa yang inklusif, perempuan merasa diakui dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Bahasa yang responsif gender dapat memberikan ruang bagi suara-suara perempuan dan mendorong mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Contoh lain dari penggunaan bahasa responsif gender adalah dengan menggunakan istilah "wakil rakyat" daripada "anggota dewan". Ini memastikan bahwa posisi tersebut tidak dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu dan membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik. Selain itu, penggunaan kata ganti netral seperti "mereka" atau "mereka semua" juga dapat menghindari asumsi tentang jenis kelamin seseorang ketika berbicara tentang sekelompok orang. Dalam rangka menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan memperkuat kesetaraan gender, penting bagi para pemimpin politik dan kampanye untuk menggunakan bahasa yang responsif gender. Dengan melakukan ini, kita dapat menciptakan ruang bagi partisipasi aktif semua individu tanpa pandang jenis kelamin atau identitas gender mereka serta meningkatkan representativitas sistem politik secara keseluruhan.

### **Penggunaan Simbol Responsif Gender**

Penggunaan simbol-simbol responsif gender memiliki kekuatan komunikatif yang luar biasa dalam menyampaikan pesan politik. Simbol-simbol ini mampu dengan cepat dan efektif menggambarkan ide, nilai, dan aspirasi politik kepada masyarakat. Dalam konteks kesetaraan gender, penggunaan simbol-simbol yang responsif gender sangat penting untuk memperlihatkan keberagaman dan kesetaraan dalam perwakilan politik. Simbol-simbol yang responsif gender dapat membantu melawan stereotip dan norma sosial yang membatasi perempuan dalam dunia politik. Pentingnya penggunaannya terletak pada kemampuannya untuk merepresentasikan keberagaman identitas gender serta menggambarkan perempuan dalam berbagai peran politik. Dalam banyak kasus, gambar atau ikon yang digunakan secara dominan adalah laki-laki atau memiliki ciri-ciri maskulin. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa posisi-posisi penting dalam politik hanya cocok bagi laki-laki.

Berikut adalah beberapa contoh konkret dari penggunaan simbol-simbol responsif gender:

---

*Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Simbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*

1. Penggunaan gambar seorang perempuan sebagai presiden atau perdana menteri, Ini membantu memperkuat gagasan bahwa posisi kepemimpinan tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.
2. Penggunaan tanda seru dengan bentuk feminim, misalnya, menggunakan tanda seru dengan rok dapat menjadi cara kreatif untuk menunjukkan bahwa suara-suara perempuan dianggap penting dan harus didengar di dunia politik.
3. Penggunaan warna-warna yang responsif gender, misalnya, menggunakan warna ungu atau merah muda sebagai warna dominan dalam kampanye politik dapat memberikan pesan bahwa partai atau gerakan tersebut mendukung kesetaraan gender dan menghargai peran perempuan dalam politik.
4. Penggunaan simbol jari telunjuk yang menunjuk ke atas dengan bentuk feminim, simbol ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pemberdayaan perempuan dan pentingnya suara mereka dalam pengambilan keputusan politik.
5. Penggunaan gambar atau ikon yang merepresentasikan perempuan dalam berbagai peran politik, misalnya, menggunakan gambar seorang perempuan sebagai anggota parlemen, aktivis politik, atau pemimpin partai dapat membantu memperlihatkan bahwa posisi-posisi tersebut tidak terbatas pada laki-laki saja.

**Gambar 1** Foto keliling Perempuan dalam berita Pemilu (Septiani, 2019).



**Gambar 2** Promosi Hari Kesetaraan Perempuan menggunakan foto ikon politik perempuan (Habib, 2023).



Dalam rangka menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan memperkuat kesetaraan gender, penting bagi para pemimpin politik dan kampanye untuk menggunakan simbol-simbol yang responsif gender. Dengan melakukan ini, kita dapat mengubah persepsi masyarakat tentang peranan perempuan dalam politik serta meningkatkan representasi mereka secara keseluruhan. Simbol-simbol tersebut memiliki potensi besar untuk menginspirasi dan memotivasi individu-individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik tanpa pandang jenis kelamin atau identitas gender mereka. Penggunaannya juga membantu menciptakan ruang aman bagi individu-individu dengan identitas gender non-biner atau transgender agar merasa diakui dan dihargai dalam dunia politik. Simbol-simbol responsif gender dapat menjadi alat yang kuat untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka.

Penggunaan simbol-simbol responsif gender memiliki kekuatan komunikatif yang besar dalam menyampaikan pesan politik. Pentingnya penggunaannya terletak pada kemampuannya untuk merepresentasikan keberagaman identitas gender serta menggambarkan perempuan dalam berbagai peran politik. Dengan menggunakan simbol-simbol ini, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, mengubah persepsi masyarakat tentang peranan perempuan dalam politik, dan meningkatkan representasi mereka secara keseluruhan.

### **Tantangan dalam Implementasi Strategi Kampanye Inklusif**

Implementasi strategi kampanye inklusif di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi. Meskipun ada peraturan yang berlaku untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan isu-isu gender dan resistensi terhadap perubahan budaya masih membatasi implementasi strategi kampanye inklusif. Salah satu faktor yang membatasi implementasi strategi kampanye inklusif adalah kurangnya kesadaran akan isu-isu gender. Masih banyak orang di Indonesia yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya kesetaraan gender dan perlunya mewujudkan representasi yang adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap upaya untuk menciptakan kampanye politik yang inklusif.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan budaya juga menjadi kendala dalam implementasi strategi kampanye inklusif. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan pergeseran paradigma dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender. Mereka mungkin memiliki keyakinan lama tentang peran-peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam politik, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima konsep baru tentang keberagaman dan kesetaraan. Di Indonesia, ada beberapa aturan dan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mewajibkan partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan.

Jika kita melihat website salah satu partai besar PDI Perjuangan, dalam struktur pengurus DPP yang dirilis di websitenya dapat dilihat hanya terdapat 7 pengurus wanita dari keseluruhan 26 foto pengurus yang tertera; ini menunjukkan bahwa partai besar di pemerintah pun untuk keterwakilan perempuan di struktur tertinggi DPP hanya sebanyak 26,7% (PDI Perjuangan, 2023).

### **Gambar 3** Pengurus DPP PDI Perjuangan



Dalam rangka mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik dalam pesta demokrasi di Indonesia, tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan tekad dan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu gender, merubah norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah, LSM, partai politik, dan masyarakat umum; kita dapat menciptakan kampanye-kampanye yang benar-benar inklusif bagi semua individu tanpa pandang jenis kelamin atau identitas gender mereka.

## KESIMPULAN

Kesenjangan gender dalam partisipasi politik di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan. Perempuan menghadapi hambatan-hambatan struktural dan sosial yang membatasi akses mereka ke arena politik, seperti stereotip gender, norma budaya patriarki, dan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dampak dari kesenjangan ini terhadap demokrasi dan pembangunan negara sangat besar. Untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mendorong kebijakan-kebijakan inklusi gender dalam politik, seperti kuota perempuan dalam struktur kelembagaan dan partai politik. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengubah stereotip dan norma budaya patriarki yang ada.

Strategi kampanye inklusif dengan penggunaan bahasa dan simbol-simbol responsif gender memiliki peran penting dalam mencapai kesetaraan gender dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Strategi ini menciptakan lingkungan komunikasi yang aman, merubah persepsi masyarakat tentang peranan perempuan dalam politik, serta meningkatkan partisipasi aktif semua individu tanpa pandang jenis kelamin atau identitas gender mereka. Penggunaan bahasa responsif gender dapat menghindari penggunaan kata-kata maskulin sebagai bentuk umum yang mengabaikan identitas gender lainnya. Penggunaannya juga memberikan ruang bagi suara-suara perempuan serta mendorong mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Penggunaan simbol-simbol responsif gender juga penting untuk merepresentasikan keberagaman identitas gender dan menggambarkan perempuan dalam berbagai peran politik.

Implementasi strategi kampanye inklusif di Indonesia menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran akan isu-isu gender dan resistensi terhadap perubahan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kesadaran melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan dari pemerintah, LSM, dan partai politik, serta kampanye edukatif untuk merubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik. Dengan mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik, Indonesia dapat mencapai kesetaraan gender sekaligus memperkuat demokrasi dan pembangunan negara. Partisipasi aktif semua warga negara tanpa pandang jenis kelamin adalah kunci untuk menciptakan sistem politik yang representatif, adil, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

Adawiyah, C. R. (2018). Urgensi Komunikasi dalam Kelompok Kecil untuk Mempercepat Proses Adopsi Teknologi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(1). <https://doi.org/10.21082/fae.v35n1.2017.59-74>



- Agusta, R. (2020). *Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan Dalam Pemilu*.
- Damayanti, C. (2021). Posisi Perempuan dalam Lingkaran Pengetahuan. *Studia Philosophica et Theologica*, 21(2).
- Fadli, M., Bailusy, Muh. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *ARISTO*, 6(2). <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Fanani, A. Z. (2017). Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender. *Muslim Heritage*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>
- Habib, H. (2023). *Indeks Kesetaraan Gender Jatim Terus Meningkat Signifikan*.
- Kemenpppa. (2018). *Press Release Tingkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2019*.
- MKRI. (2023). *UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- MPR RI, S. J. (2023). *Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Butuh Dukungan semua Pihak*.
- PDIPerjuangan. (2023). *Pengurus DPP PDI Perjuangan*.
- Prayitno, S. (2017). *Manajemen Komunikasi Pemasaran Terpadu*.
- Rahmayanti, R. (2020). *Rasionalisasi Partai Demokrat dalam menentukan calon perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Nusa Tenggara Barat*.
- Renny Puspitasari. (2017). Difusi Inovasi E – Paper Solopos. *Difusi Inovasi E – Paper Solopos*.
- Rokhmansyah Alfian. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme - Alfian Rokhmansyah - Google Buku. In *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*.
- Septiani, A. (2019). *Kelingking Paling Banyak Dichelup Tinta, Kecantikan Atau Ada Alasan Lain?* .
- Wardana, M. A. W. (2022). Kajian Feminisme dan Citra Perempuan dalam Puisi Dongeng Marsinah Karya Sapardi Djoko Damono. *Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya)*, 4(1). <https://doi.org/10.26555/jg.v4i1.5049>
- Yusuf, R. I. (2022). *Komunikasi politik: seni dan teori*.